

KERJA SAMA SISTER PROVINCE JAWA BARAT DAN AUSTRALIA SELATAN DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

Dina¹, Gunawan Undang², Yasmin Nur Zahra³

^{1&3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Al-Ghifari, Indonesia,

² Universitas Pembina Masyarakat Indonesia,
dina.shusein@gmail.com, gunawanundang@gmail.com, yasminnz2606@gmail.com

ABSTRACT

West Java is a province in Indonesia that has sister province relations with several provinces, including the Educational Cooperation with South Australia. However, there are still several obstacles, including the unpreparedness of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The purpose of this research is to find out how the sister provinces of West Java and South Australia cooperate in improving education in West Java. This study uses qualitative methods. Data was collected through observation, interviews and documentation. Data validation was carried out through triangulation techniques. The results of the study show that the sister province cooperation has been running, but it has not been optimal due to factors that hinder the cooperation process of the sister provinces of West Java and South Australia.

Keywords: *Cooperation, sister province, education*

ABSTRAK

Jawa Barat merupakan provinsi di Indonesia yang menjalin hubungan *sister province* dengan beberapa provinsi, antara lain Kerjasama Pendidikan dengan Australia Selatan. Namun masih menemui beberapa kendala antara lain ketidaksiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kerja sama *sister province* Jawa Barat dan Australia Selatan dalam meningkatkan pendidikan di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama *sister province* telah berjalan, namun belum optimal dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat terhadap proses kerja sama *sister province* Jawa Barat dan Australia Selatan.

Kata kunci: *Kerjasama, sister province, pendidikan*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini kerja sama internasional dengan mudah dilakukan. Kerja sama juga dilakukan oleh aktor-aktor sub-negara bentuk kerja sama ini adalah kerja sama *sister province*. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 363. Jawa Barat merupakan provinsi di Indonesia yang menjalin kerja sama *sister province* dengan beberapa provinsi atau negara bagian dari negara lain. salah satu mitranya yaitu Australia Selatan. Kerja sama *sister province* yang dilakukan oleh Jawa Barat dan Australia Selatan ini tidak hanya bergerak di satu bidang saja melainkan di beberapa bidang lainnya salah satunya bidang pendidikan.

Interaksi umat manusia merupakan hal yang paling menarik untuk terus disimak perkembangannya. Perkembangan ini merupakan bentuk-bentuk paling mutakhir yang manusia coba untuk mencapai kemasylahatan hidupnya. Manusia senantiasa membuka cakrawala interaksinya antar sesama di seluruh dunia mana saja yang mampu ia jangkau. Seperti halnya

interaksi yang mungkin terjadi antara manusia suatu negara dan negara lainnya. Dimana hal ini lebih dikenal dengan proses diplomasi (Dina & Nurhud, 2019)

Kemajuan pendidikan Jawa Barat dilihat dari nilai indeks pendidikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Nilai indeks pendidikan didapat dari dua komponen pembentuk yaitu angka melek huruf dan angka harapan lama sekolah yang dimana pada tahun 2015 ada pada angka 59,95. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan menemukan bagaimana kerja sama *sister province* Jawa Barat dan Australia Selatan berjalan untuk meningkatkan pendidikan di Jawa Barat.

KAJIAN TEORI

a. Teori Konstruktivisme

Menurut Alexanderov Maxym mengemukakan bahwa konstruktivisme merupakan sebuah pendekatan dalam dunia hubungan internasional dengan prioritas sentralitas gagasan atau ide serta kesadaran manusia atas penekanan terhadap perspektif holistik (sistem alam semesta secara utuh) dan idealis terkait struktur. Konstruktivis meletakkan ketertarikannya pada cara kerja struktur yang nantinya akan membangun identitas dan kepentingan para pelaku atau aktor internasional, membahas bagaimana struktur tersebut jugalah yang nantinya akan memlimitasi interaksi pelaku atau aktor terkait, serta bagaimana interaksi aktor-aktor sehingga mampu memproduksi dan mengubah struktur itu sendiri (Novianty, 2022)

Teori dalam hubungan internasional yang menekankan peran ide dan norma dalam membentuk politik dunia. Menurut teori ini, perilaku negara dan aktor internasional lainnya tidak semata-mata ditentukan oleh faktor material seperti kekuasaan atau sumber daya, tetapi juga oleh konstruksi sosial seperti norma, nilai, dan identitas. Konstruktivisme berpendapat bahwa konstruksi sosial ini tidak tetap atau alami, tetapi dibentuk oleh interaksi manusia dan dapat berubah seiring waktu. Teori tersebut menunjukkan bahwa aktor internasional dapat menciptakan norma dan identitas baru melalui tindakan yang bertujuan, dan bahwa ide-ide ini dapat berdampak signifikan pada politik dunia. Sarjana konstruktivisme telah mempelajari berbagai isu termasuk lembaga internasional, resolusi konflik, dan peran media dalam membentuk opini publik. konstruktivisme juga merupakan perspektif teoritis dalam bidang pendidikan dan psikologi yang menekankan pentingnya peran aktif individu dalam konstruksi pengetahuan dan pemahaman mereka. Teori ini berpendapat bahwa individu tidak secara pasif menerima informasi dari lingkungan, tetapi mereka secara aktif membangun pengetahuan mereka melalui proses kognitif, refleksi, dan sosial.

b. Teori Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan hubungan antar negara. “Secara sempit hubungan internasional didefinisikan sebagai hubungan antar negara (inter-states relations), Atau hubungan antarbangsa (relations between/among nations). Sebagaimana dikatakan Chris Brown dan Kristen Ainley, HI Adalah studi tentang hubungan negara-negara (relations of states).” (Bakry, 2017)

Hubungan internasional merupakan hubungan yang terjadi antar bangsa baik itu yang bersifat positif seperti kerja sama, persahabatan, dan lain sebagainya tetapi juga dapat bersifat negatif seperti permusuhan atau peperangan. Dalam kedua teori tersebut dapat dikaitkan bahwa kerja sama *sister province* ini dikategorikan sebagai hubungan antarbangsa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam penelitian ini yaitu Jawa Barat dan Australia Selatan. Hubungan internasional juga mengacu pada studi tentang interaksi dan hubungan antar negara, organisasi

internasional, dan aktor lain dalam komunitas global. Ini mencakup berbagai isu seperti diplomasi, ekonomi, keamanan, hak asasi manusia, dan pemerintahan global.

c. Teori Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai “Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.” (Arifin, 2019)

Kerja sama internasional adalah mengacu pada kerja sama internasional antar negara atau organisasi untuk saling menguntungkan. Ini dapat melibatkan kolaborasi di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, budaya, teknologi, sains, dan pendidikan. Kerja sama internasional penting untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran antar negara.

d. Teori Sister Province

Sister city merupakan hubungan yang dijalin oleh dua kota yang dimana konsepnya bisa diibaratkan dengan "sahabat pena antara dua kota" dalam skema yang berskala lebih luas. "Sahabat" dalam arti ini diartikan sebagai keseluruhan kota. Praktikanya, adanya "twinning" mengarah pada program pertukaran pelajar, kolaborasi atau pertukaran ekonomi maupun kultural (Kurniawati, 2020)

sister city merupakan kemitraan antara dua kota dari negara yang berbeda yang sepakat untuk mempromosikan ikatan budaya dan komersial untuk menumbuhkan niat baik dan saling pengertian. Kedua kota sepakat untuk berkolaborasi dalam berbagai kegiatan seperti perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan pertukaran budaya. Gagasan di balik kota kembar adalah untuk mempromosikan pemahaman budaya dan pertumbuhan ekonomi melalui kemitraan yang menguntungkan kedua kota yang terlibat. Konsep kota kembar dipelopori oleh Presiden Eisenhower pada tahun 1956 sebagai cara mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar negara setelah Perang Dunia II.

e. Landasan Kebijakan Sister Province

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan hukum yang mengatur tata cara pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur tentang otonomi daerah, struktur pemerintahan daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Daerah dapat menjalin kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama dengan lembaga atau pemerintah di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus untuk kerja sama dengan daerah lain, kerja sama daerah dikategorikan menjadi dua yakni kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar daerah berbatasan untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama, sedangkan kerja sama sukarela merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Metodologi Penelitian

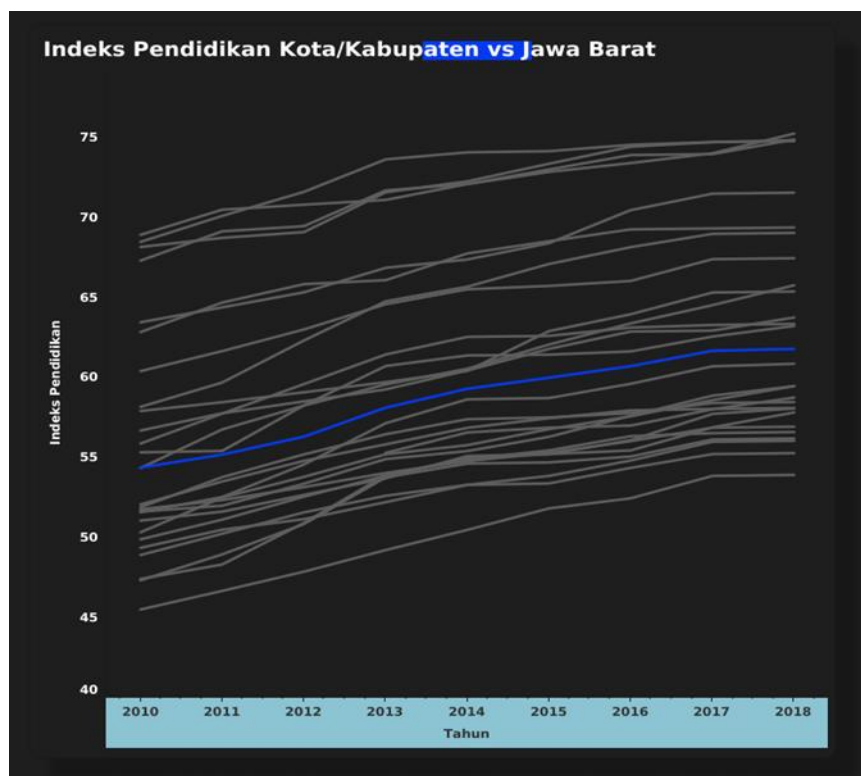
Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kali ini adalah menggunakan metode studi literatur dan juga wawancara. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus kata yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017)

PEMBAHASAN

a. Kerja sama Sister province Jawa Barat dan Australia Selatan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Jawa Barat

Kerja sama Jawa Barat dengan Australia Selatan, bukanlah mitra baru bagi Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1997 telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama Sister province. Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima permintaan dari Pemerintahan South Australia untuk melakukan revitalisasi kerja sama sister province yang telah terjalin sebelumnya. Namun pada pelaksanaannya ternyata revitalisasi dari kerja sama tersebut mengalami kendala-kendala. Pada tahun 2015 kerja sama sister province Jawa Barat dan Australia Selatan kembali terjalin yang ditandai dengan penandatanganan MoU yang ditandatangani di sela-sela pembukaan festival terbesar di Australia ‘ozAsia’ oleh Wakil Gubernur Jawa Barat dan Premier Australia Selatan yang bertempat di Adelaide pada 24 September 2015.

Diketahui bahwa ada 10 program yang dibuat oleh Jawa Barat dan Australia Selatan di bidang pendidikan dimana 6 dari program tersebut telah terlaksana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program telah terlaksana 60% dari 100%.



Data Indeks Pendidikan di Jawa Barat

Tabel di atas menunjukkan adanya perkembangan pada indeks pendidikan di Jawa Barat yang sebelumnya pada tahun 2015 berada pada angka 59,95 dan pada 2018 ada pada angka 61,75 yang artinya indeks pendidikan di Jawa Barat meningkat sebesar 1,8 poin.

Dari hasil tinjauan literatur, penulis membagi kriteria keberhasilan menjadi dua, yakni kriteria kinerja dan kriteria efektivitas. Kriteria kinerja, yakni dilihat dari indikator input, proses, dan output kerjasama *sister city*. Sedangkan kriteria efektivitas, yaitu hasil yang diinginkan telah dicapai dari kerjasama *sister city* (Dunn, 1998).

Kriteria	Indikator	Sub-indikator	Definisi	Parameter
Kinerja Kerjasama <i>Sister city</i>	Input Lengkap	Kepemimpinan Kuat	Kemampuan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan sistem yang dibentuk dalam menjalankan program/kegiatan.	- Adanya pengaruh pemimpin untuk mencapai tujuan - Adanya konsistensi keberlangsungan program
		Karakteristik Wilayah yang Sama	Kondisi kota yang memberikan pengaruh terhadap keberjalanan program/kegiatan.	Adanya kesamaan sejarah, geografis, tingkat pembangunan, budaya, dan struktur ekonomi kedua pihak
		Sumber Daya Tersedia	Pembagian wewenang antar <i>stakeholder</i> dalam mengakomodasi keberjalanan suatu program/kegiatan serta menjaga keefektifan program/kegiatan tersebut.	- Adanya pengalokasian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak - Adanya pengalokasian dana kegiatan
		Kebijakan nasional dan provinsi yang Mendukung	Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan implementasi program	- Adanya peraturan yang mendukung keberlangsungan kerjasama - Adanya bantuan informasi dan pengurusan administrasi kerjasama
	Proses Terpenuhi	Hubungan Timbal Balik terjadi	Kedua pihak memiliki sesuatu untuk memberi dan menerima, dimana manfaat dari kerjasama ini mengalir di dua pihak.	- Adanya kegiatan pertukaran yang rutin dilaksanakan antara dua kota - Adanya hasil atau manfaat yang dirasakan oleh kedua kota
		Komunikasi dilakukan rutin dan dua arah	Komunikasi yang terjadi antar setiap aktor	- Adanya pertukaran informasi yang dilakukan kedua pihak - Adanya proses komunikasi untuk melahirkan kesepakatan bersama
		Melibatkan Stakeholder lain	Keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung <i>stakeholder</i> lain diluar pemerintah yang mendukung keberjalanan program	- Adanya keterlibatan institusi/pihak lain selain pemerintah - Adanya media dan insentif yang digunakan untuk memfasilitasi keterlibatan <i>stakeholder</i>
	Output Jelas	Melakukan Inovasi	Kemampuan mengembangkan proyek khusus yang mengarah pada hubungan yang lebih mendalam antara kedua kota.	- Adanya organisasi khusus yang diciptakan - Adanya proyek-proyek baru dalam kegiatan kerjasama
		Kesepakatan/perjanjian kerjasama jelas	Nota kesepahaman/ MOU adalah pernyataan yang jelas, singkat dari tujuan, sasaran dan kegiatan yang direncanakan.	Adanya perjanjian/ kesepakatan tertulis terkait kerjasama <i>sister city</i>
	Efektivitas Kerjasama <i>Sister city</i>	Terdapat Outcome	Kegiatan/Program memberikan hasil yang diinginkan	Adanya hasil dari kegiatan <i>sister city</i> yang telah dilaksanakan

Sumber : Rochman dan Hudalah. *Evaluasi Keberhasilan Kerja Sama Antar Kota 'Sister City' Kota Surabaya*. 2013: 4.

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa kinerja serta efektivitas kerja sama *sister city* Jawa Barat dan Australia Selatan telah berjalan namun belum optimal dikarenakan adanya beberapa program yang belum dapat dilaksanakan oleh kerja sama ini.

b. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Kerja Sama Sister Province Jawa Barat dan Australia Selatan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Jawa Barat

Pada tahun 2012, pemerintah Australia Selatan melakukan kegiatan untuk merevitalisasi partisipasi *sister province* yang telah ada. Pemerintah Australia Selatan mengiklankan untuk melakukan revitalisasi, pemerintah Jawa Barat mengakui permintaan yang diajukan oleh pemerintah Australia Selatan. Namun saat itu revitalisasi sempat mengalami kendala. Kendala tersebut dialami oleh persiapan pemerintah Jawa Barat sendiri. Jawa Barat menghadapi ketidaksiapan untuk revitalisasi keterlibatan, ketidaksiapan ini terjadi karena tidak ada energi kooperatif antara Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Daerah (APBD) dengan pembiayaan program dan partisipasi yang akan dilakukan. Sesuai dengan yang dikatakan informan AS yang menjelaskan bahwa anggaran pelaksanaan kerjasama *sister city* ini berasal dari alokasi dana APBD Propinsi Jawa Barat. Dimana menurut UU No. 32 Tahun 2003 tentang APBD,

APBD adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan Daerah (perda). Alokasi dana APBD Propinsi Jawa Barat untuk kerjasama sister city dengan Australia Barat ini sangatlah terbatas, karena dana untuk pelaksanaan program kerjasama sister city ini bukan hanya dengan Australia Barat saja, tetapi banyak Propinsi lain yang juga melaksanakan kerjasama sister city dengan Provinsi Jawa Barat. Sehingga pelaksanaan program tidak berjalan dengan maksimal sesuai dengan apa yang direncanakan, karena pelaksanaan program disesuaikan dengan mengefektifkan dan mengefisienkan dana yang ada.

Selain itu walaupun telah melakukan evaluasi tahunan bersama dengan pihak South Australia terkait program kerja sama yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, sehingga program kerja sama tersebut dapat terkontrol penyelenggaraannya oleh kedua belah pihak namun kendala dalam menjalankan program kerja sama tetap terjadi. Kendala tersebut terletak pada ketersediaan anggaran yg dimiliki oleh Perangkat Daerah/Dinas terkait dan juga ketersediaan anggaran di pihak Australia sehingga membuat kegiatan tersebut tertunda. Dan untuk tahun 2020-2021 kegiatan tertunda dikarenakan sulitnya menyelenggarakan program kerja sama yang diakibatkan oleh merebaknya pandemi COVID-19.

c. Upaya Indonesia Mempertahankan Kerja Sama Sister Province Jawa Barat dan Australia Selatan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Jawa Barat

Hubungan antar kedua negara sempat menjadi tegang pada bulan April 2015 ketika Presiden Indonesia Joko Widodo mengabaikan permintaan dari Australia untuk memberikan grasi kepada terdakwa pengedar narkoba Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang kemudian akhirnya dihukum mati. Tapi kunjungan sukses Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull ke Jakarta pada tahun yang sama, dipandang bisa mencairkan ketegangan.

Kerja sama Provinsi-Negara Bagian Bersaudara (*Sister province-State*) antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Pemerintah Negara Bagian *South Australia* (SA) pertama kali terbentuk pada tahun 1997, diperbarui terakhir kali pada 24 September 2015 di Adelaide dan ditandatangani oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018 Deddy Mizwar dan Premier Australia Selatan Jay Weatherill. Ruang lingkup kerja sama, yaitu di bidang Pertanian, Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan, serta Perdagangan dan Investasi.

KESIMPULAN

Kerja sama *sister province* Jawa Barat dan Australia Selatan memiliki 10 program di bidang pendidikan dan 6 dari 4 program tersebut telah berhasil dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan sehingga indeks pendidikan di Jawa Barat yang sebelumnya pada tahun 2015 berada pada angka 59,95 dan pada 2018 ada pada angka 61,75 yang artinya indeks pendidikan di Jawa Barat meningkat sebesar 1,8 poin. Dan kendala dalam menjalankan program kerja sama tersebut terletak pada ketersediaan anggaran yg dimiliki oleh Perangkat Daerah/Dinas terkait dan juga ketersediaan anggaran di pihak Australia sehingga membuat kegiatan tersebut tertunda. Dan untuk tahun 2020-2021 kegiatan tertunda dikarenakan sulitnya menyelenggarakan program kerja sama yang diakibatkan oleh merebaknya pandemi COVID-19.

Pada April 2015, ketegangan antara kedua negara meningkat ketika Presiden Indonesia Joko Widodo menolak tuntutan Australia untuk meringankan hukuman mati terhadap tersangka pengedar narkoba Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Namun, keberhasilan kunjungan

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull ke Jakarta pada tahun yang sama diyakini mampu meredam ketegangan.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. S. (2019). *Implementasi Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa) dalam Ekspor Tekstil Indonesia Ke Jepang*. . 15–16.
- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Kencana.
- Dina, D., & Nurhud, P. (2019). *Diplomasi Publik Tiongkok Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Proyek Jalur Sutra*. *Global Mind*, 1(1).
- Dunn, N. W. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Kurniawati, R. N. K. (2020). *Book Chapter Rumah Kita-Dosen Indonesia (Inovasi Pembelajaran)*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (36th ed.). PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Novianty, S. A. (2022). *Metodelogi, Teori Kritis dan Teori Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional (Methodology, Critical Theory and Constructivism Theory in International Relations)*.